

DUKUNGAN ISRAEL DALAM REFERENDUM KEMERDEKAAN KURDISTAN DI IRAK 2017

Riyan Renaldy

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Komputer Indonesia, Jalan Dipatiukur Nomor 112 - 114 Bandung.

E-mail: Riyannnrenaldy@gmail.com

Abstract

The background of this study is to analyze what the interests of Israel in supporting the referendum independence of Kurdistan in Iraq. In this case Israel has a background of cooperation that had been carried out before the establishment of the Iraqi Kurdistan autonomous region in 2005, Israel became the first country and was the only one to publicly express support for the referendum on the independence of Kurdistan in Iraq. The method used in this study is qualitative method. The results of this study show what Israel has done to support the referendum on Iraqi Kurdistan independence, what benefits did Israel get and how the Iraqi government respond to the issue of Iraq's Kurdistan independence referendum.

Keywords: Independence referendum, Iraq Kurdistan, Israel, Iraq

Abstrak

Latar belakang dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang apa kepentingan Israel dalam mendukung referendum kemerdekaan Kurdistan di Irak, dimana dalam hal ini Israel memiliki latar belakang kerjasama yang telah dilakukan sebelum berdirinya daerah otonom Kurdistan Irak tahun 2005, Israel menjadi negara pertama dan menjadi satu-satunya yang menyatakan dukungan secara terbuka kepada referendum kemerdekaan Kurdistan di Irak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan apa saja yang dilakukan Israel dalam mendukung referendum kemerdekaan Kurdistan Irak, keuntungan apa yang Israel dapat serta bagaimana pemerintah Irak menyikapi permasalahan referendum kemerdekaan Kurdistan Irak.

Kata Kunci: Referendum kemerdekaan, Kurdistan Irak, Israel, Irak

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam ilmu hubungan internasional permasalahan tentang konflik menjadi salah satu kajian yang sudah lama menjadi perhatian dimana dalam hal ini Timur Tengah menjadi satu kawasan yang rentan terjadi konflik yang disebabkan dan memiliki latar belakang masalah yang kompleks dan bervariasi dalam faktor pendorong terjadinya konflik. Kurdi merupakan salah satu etnik yang ada di kawasan Timur Tengah yang tersebar di beberapa negara di Timur Tengah dimana diantaranya meliputi Irak, Iran dan Turki yang memiliki populasi etnik Kurdi yang besar. Permasalahan separatisme merupakan latar belakang terjadinya konflik yang terjadi antara etnik Kurdi Irak dan pemerintah Irak dimana hal ini yang membedakan etnik kurdi Irak dengan etnik Kurdi yang berada di negara-negara lain.

Permasalahan awal terjadinya konflik antara Kurdi Irak dan pemerintah Irak terjadi karena adanya tuntutan dari etnik Kurdi Irak kepada pemerintah Irak dengan tujuan untuk memiliki wilayah sendiri di Irak. Hal ini menjadi faktor pendorong dalam terjadinya konflik antara etnik Kurdi Irak dan pemerintah Irak. Dalam melakukan pemberontakan pada tahun 1965 sampai tahun 1975 etnik Kurdi Irak mendapat bantuan dalam melakukan

pemberontakan yang dilakukan kepada pemerintah Irak dari Israel, dimana hal ini disampaikan oleh perdana menteri Israel saat itu Menachem Begin pada tahun 1980, bahwa Israel ikut terlibat dalam memberikan persenjataan dan pelatihan militer terhadap etnik kurdi Irak (<https://www.meforum.org/articles/2014/suprisi-ng-ties-between-israel-and-the-kurds> diakses pada 12 maret 2018).

Permasalahan konflik Kurdi Irak dengan pemerintah Irak berlanjut dengan munculnya operasi militer yang dilakukan oleh pemerintah Irak dalam melihat permasalahan etnik Kurdi Irak, operasi militer ini dinamai *Al-Anfal* dimana dalam implementasinya operasi militer ini dilakukan pada tahun 1986 sampai tahun 1989 dan karena adanya operasi militer ini menyebabkan jatuhnya korban dari etnik Kurdi yang diperkirakan mencapai 182.000 korban selama dilaksanakannya operasi militer *Al-Anfal* (Human Rights Watch, 1993 : 5-7)

Pada 30 Januari tahun 2005 Kurdistan Irak mengadakan referendum pertama untuk meminta pendapat kepada masyarakat dalam pembentukan wilayah otonom Kurdistan di Irak utara dan pada 15 oktober 2005 Kurdistan Irak diakui secara sah, dimana pada saat diadakan referendum nasional di Irak, 78% warga Irak menyetujui tentang adanya konstitusi baru Irak, dimana hal ini membuat Kurdistan Irak diakui

secara institusi wilayah dan juga pengakuan terhadap pemerintah regional Kurdistan Irak beserta Parlemen Kurdistan Irak (<http://cabinet.gov.krd/p/page.aspx?l=12&s=050000&r=306&p=216> diakses pada 13 maret 2018).

Setelah berdirinya wilayah otonom Kurdistan Irak, isu tentang hubungan Kurdi Irak dengan Israel kembali muncul, dimana dalam hal ini, terdapat keterlibatan perusahaan Israel dalam pembangunan bandara utama Kurdistan Irak di Erbil yang selesai pada tahun 2005. Dalam pembangunan bandara internasional Erbil, terdapat dua perusahaan yang menjadi mitra dalam pembangunan bandara Kurdistan Irak, dimana perusahaan tersebut adalah Motorola dan Magalcom dimana dua perusahaan tersebut dimiliki oleh pengusaha asal Israel yakni Shlomi Michaels (Neriah, 2012 : 27).

Hubungan antara pemerintah pusat Irak dan Kurdistan Irak mulai tidak berjalan dengan baik selama periode masa jabatan perdana menteri Irak Nuri al-Maliki yang meliputi periode tahun 2010 sampai 2014 dimana masalah ini diawali dengan tidak adanya anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat Irak kepada pemerintah regional Kurdistan sebanyak 17% dari jumlah anggaran Irak. Dalam hal ini pemerintah pusat Irak mempermasalahkan tentang adanya kontrak-kontrak yang telah ditandatangani secara sepihak oleh pemerintah regional Kurdistan yang melibatkan perusahaan-perusahaan minyak internasional untuk melakukan investasi dan penjualan minyak tanpa melewati regulasi dan persetujuan pemerintah Irak (Al-Qarawee, 2016 : 4).

Memasuki tahun 2017, muncul agenda tentang akan dilaksanakan referendum kemerdekaan Kurdistan Irak, dimana sebelum pelaksanaan referendum kemerdekaan Kurdistan Irak sudah mendapat banyak kecaman karena dikhawatirkan akan menimbulkan konflik baru di kawasan Timur Tengah, khususnya antara pemerintah Irak dan pemerintah regional Kurdistan Irak. Namun pada akhirnya referendum kemerdekaan Kurdistan Irak tetap dilaksanakan pada september 2017, dengan menghasilkan suara 93% menyatakan setuju terhadap referendum kemerdekaan Kurdistan Irak (<https://tirto.id/referendum-kurdi-93-warga-memilih-merdeka-dari-irak-cxqD> pada 13 maret 2018).

Ditengah kecaman dari pemerintah pusat Irak, Iran, dan Turki dalam melihat referendum kemerdekaan Kurdistan Irak, Israel muncul sebagai negara pertama dan satu-satunya yang menyatakan dukungan terbuka kepada referendum kemerdekaan Kurdistan Irak, dukungan terbuka Israel kepada referendum kemerdekaan Kurdistan Irak tersebut disampaikan langsung oleh Menteri

Kehakiman Israel yakni Ayelet Shaked(<https://okezone.com/read/2017/09/12/18/1774076/wah-akui-punya-kepentingan-israel-dukung-kurdi-merdeka-dari-irak> diakses pada 13 Maret 2018).

Tuduhan Irak, Iran dan Turki bahwa ada peran Israel dibalik referendum kemerdekaan Kurdistan bukanlah tanpa sebab jika dilihat kembali pada latar belakang strategi Israel jangka pendek Israel pada awal berdirinya negara Israel, selain hal tersebut masuknya Kurdistan Irak dalam jurnal yang berjudul *A Strategy for Israel in the Nineteen Eighties* yang menjelaskan tentang bagaimana cara Israel untuk menghadapi negara-negara kawasan Timur Tengah, dimana dalam jurnal ini Kurdistan Irak masuk kedalam agenda sebagai kelompok separatis di Irak yang dapat di jadikan aliansi Israel untuk memecah negara Irak (Yinon, 1982 : 8).

1.2 Rumusan Masalah

1.2.2 Rumusan Masalah Mayor

Dari penjelasan diatas mengenai hubungan yang sudah dilakukan Israel dan Kurdistan Irak serta munculnya dukungan terbuka Israel dalam melihat referendum kemerdekaan Kurdistan Irak 2017, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang masalah ini dengan rumusan masalah: “Apa Kepentingan Israel Dalam Mendukung Referendum Kemerdekaan Yang Dilakukan Oleh Kurdistan Irak?”

1.2.3 Rumusan Masalah Minor

1. Apa saja langkah nyata yang dilakukan Israel dalam mendukung referendum kemerdekaan Kurdistan Irak?
2. Keuntungan apa yang didapatkan Israel dari mendukung referendum kemerdekaan Kurdistan Irak?
3. Bagaimana pemerintah Irak menyikapi masalah referendum kemerdekaan Kurdistan Irak?

1.3 Maksud dan Tujuan penelitian

Maksud dari penelitian ini untuk mengetahui tentang apa kepentingan dan peran Israel dalam mendukung referendum kemerdekaan Kurdistan Irak 2017.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat, yang meliputi dua aspek:

1. Dalam aspek teoritis, dapat memberikan manfaat khususnya mengenai permasalahan tentang dukungan terbuka Israel dalam referendum kemerdekaan Kurdistan di Irak ditinjau dari rentang waktu 2005-2017.
2. Dalam aspek praktis, dapat memberi atau menjadi sebuah referensi dalam dinamika politik Timur Tengah, khususnya dalam permasalahan yang

melibatkan antara Israel dan Kurdistan Irak.

2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran

Dalam kajian Hubungan Internasional dapat disimpulkan bahwa hal tersebut didasari dengan adanya interaksi dari negara dengan negara dimana permasalahan politik menjadi dasar pemicu munculnya interaksi yang dilakukan oleh negara dengan negara dan hal tersebut dapat dikategorikan sebagai prinsip dasar dari munculnya tentang kajian hubungan internasional (Sitepu, 2011 : 7).

Selain meliputi permasalahan politik ekonomi, konflik, hak asasi manusia, budaya, perusahaan, organisasi dan lembaga internasional. Dalam studi Hubungan internasional juga memberikan peluang bagi kajian lain didalamnya, dimana dalam hal ini Studi hubungan internasional memberikan peluang bagi keberadaan agama dalam kajian Hubungan Internasional. Agama dapat menjadi sebuah kajian dalam Hubungan Internasional dengan melalui pendekatan pluralisme yang dilakukan oleh Lapid dalam *The Third Debate* sehingga dapat membuka ruang dan memungkinkan kajian tentang agama untuk dibahas dalam Studi Hubungan Internasional (Mulyana, 2018 : 1).

Dalam implementasinya dalam kajian hubungan internasional terdapat perubahan yang disebabkan dengan adanya perubahan dan perkembangan yang meliputi tentang sistem kenegaraan dan teknologi yang terus berkembang pesat namun dalam kajian hubungan internasional kemunculan hal baru tidak dapat dipisahkan dari hal lama dan harus tetap saling terikat, meskipun yang menjadi garis besar dalam kajian hubungan internasional masih menitik beratkan kepada negara serta interaksi antar negara (Darmayadi & dkk, 2015 : 25).

Kepentingan nasional mampu ditinjau dari bagaimana kondisi suatu negara tersebut, dimana dalam hal ini kondisi suatu negara disimpulkan sebagai hal yang meliputi tentang keadaan politik suatu negara, keadaan ekonomi negara dan sosial budaya serta meliputi keamanan suatu negara. Hal yang menjadi dasar utama kemunculan kepentingan nasional dapat dikatakan karena adanya faktor pendorong dari suatu negara dengan tujuan ingin menunjukkan atau menciptakan *power* yang dapat menimbulkan sebab akibat baik langsung atau pun tidak langsung kepada negara lain dalam mempertimbangkan dan memberikan suatu pengakuan (Sitepu, 2011 : 163).

Faktor utama dalam kemunculan konflik sosial pada dasarnya dipicu dengan adanya perbedaan dari individu atau kelompok dalam sebuah ruang lingkup sosial, perbedaan yang menjadi konteks ini dapat disebabkan oleh adanya perbedaan agama dan pandangan

ataupun karena etnik dan budaya. Konflik yang ada dalam ruang sosial tidak akan pernah dapat hilang selama masih terjadinya interaksi sosial atau dengan kata lain konflik sosial dapat hilang jika tidak ada masyarakat beserta interaksi dan ruang sosial yang saling berkaitan (Wahab, 2014 : 6)

Separatisme dalam kemunculannya dapat didasarkan pada perbedaan mendasar yang diantaranya meliputi ideologi, agama dan budaya, dimana dalam konteks ini perbedaan tersebut secara bersamaan dialami oleh suatu kelompok tertentu yang pada akhirnya menjadikan kesamaan bagi kelompok tersebut dan memicu munculnya separatisme sebagai suatu gerakan. Dalam perkembangannya tingkat gerakan separatisme mampu berkembang lebih aktif dimana hal ini diakibatkan oleh kelompok masyarakat atau etnik yang secara aktif mendukung tentang separatisme sebagai sebuah gagasan (Ryabinin, 2017 : 6-8).

Referendum sebagai sebuah mekanisme politik dalam pelaksanaannya memiliki dua hal yang tidak dapat dipisahkan, dimana dua hal tersebut adalah inisiatif dan referendum, dan dalam implementasinya inisiatif dan referendum memiliki mekanisme dan terminologi yang bervariasi, dimana bentuk inisiatif dapat diartikan sebagai:

1. Suatu mekanisme demokrasi secara langsung, dimana dalam hal ini pemilih menyarankan amandemen UU atau konstitusi baru dengan mengumpulkan tanda tangan untuk menuntut pemungutan suara yang dapat dioperasikan secara langsung maupun tidak langsung.

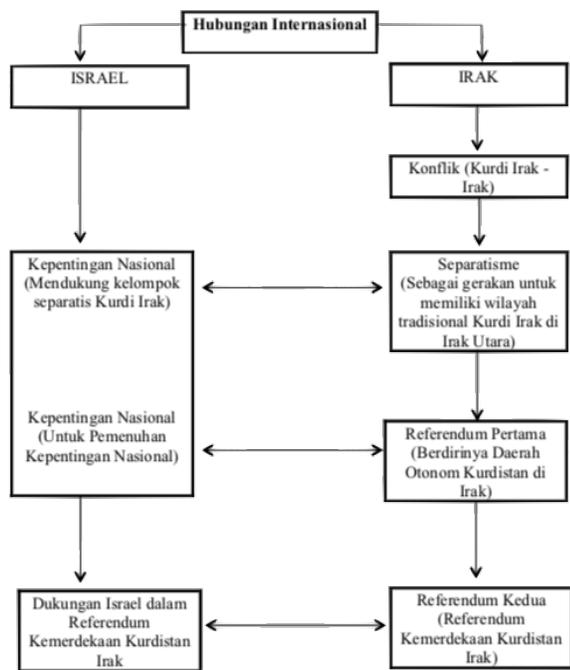
Sedangkan bentuk referendum dalam hal ini dapat dibedakan dalam beberapa perbedaan, diantaranya:

1. *Mandatory Referendum* merupakan prosedur demokrasi langsung yang diperlukan dalam tindakan tertentu, biasanya untuk amandemen konstitusi yang disarankan oleh legislatif.
2. *Popular Veto* merupakan prosedur demokrasi langsung dimana dalam hal ini pemilih menuntut pemungutan suara yang didasarkan pada sebagian undang-undang.
3. *Plebiscites* merupakan prosedur demokrasi langsung dimana dalam hal ini didasari oleh legislatif yang memprakarsai pemungutan suara yang tidak mengikat kepada kebijakan publik (Ford & Komokai, 2014 : 1-2).

Permasalahan konflik yang terjadi antara Kurdi Irak dan pemerintah Irak sudah terjadi sejak tahun 1960an dimana permasalahan ini berujung pada munculnya gerakan separatis Kurdi Irak dalam menuntut agar memiliki wilayah di Irak utara. Selama menjadi kelompok separatis Kurdi di Irak,

Kurdi Irak memiliki hubungan dengan Israel dimana hal tersebut masuk kedalam agenda Israel dalam rangka mendukung kelompok-kelompok separatis.

Setelah runtuhnya Saddam Hussein di Irak, Kurdi Irak memiliki wilayah otonom di Irak utara pada tahun 2005, dan muncul kembali tentang adanya isu kerjasama dengan Israel. Memasuki periode 2010-2014 dimana hubungan Kurdistan Irak tidak berjalan dengan baik antara pemerintah Irak dan pada tahun 2017 Kurdistan Irak mengadakan referendum kemerdekaan dan Israel muncul sebagai negara satu-satunya yang mendukung referendum kemerdekaan Kurdistan Irak.



3. Objek Penelitian dan Metode Penelitian

3.1 Tinjauan Etnik Kurdi

Kurdi merupakan salah satu etnik yang berada di kawasan Timur Tengah dimana jumlah etnik Kurdi secara menyeluruh yang tersebar dibanyak negara yang diperkirakan mencapai sekitar 30-35 juta secara keseluruhan. Secara umum mayoritas dari etnik Kurdi tersebar dibeberapa negara kawasan Timur Tengah yang meliputi Turki, Irak, Iran dan Suriah. Etnik Kurdi sendiri jika ditinjau dari asal usul keberadaannya diyakini berasal dari wilayah Corduene yakni wilayah Armenia dan Persia yang berada berdekatan dengan Danau Van di tempat yang kini disebut sebagai Turki tenggara. Kurdi merupakan sebuah kelompok etnis Indo-Eropa seperti Persia, dimana etnik Kurdi terikat secara bersama oleh faktor budaya dan bahasa yang berbeda dari etnik lain yang berada di kawasan Timur Tengah, dimana hal ini menjadikan Kurdi sebagai etnik minoritas dikawasan Timur Tengah dan hal ini disebabkan oleh perbedaan latar belakang budaya, agama dan sejarah yang dimiliki Kurdi. Etnik Kurdi memiliki bahasa tersendiri dimana bahasa tersebut berasal dari akar budaya yang sama dengan akar budaya dari bahasa Iran yang juga berasal dari etnis Indo-Eropa. (Torelli, 2016 : 21-22).

Kurdistan Irak menganut sistem pemerintahan demokrasi parlementer dimana secara struktur pemerintahan *Kurdistan Regional Government* memiliki presiden sebagai kepala pemerintahan secara *de jure* dan Perdana Menteri yang memiliki wewenang dalam menjalankan pemerintahan, *Kurdistan Regional Government* memiliki 19 Menteri dan Departemen Hubungan Luar Negeri dimana hal ini memungkinkan untuk *Kurdistan Regional Government* melakukan kerjasama dengan negara-negara lain, dimana dalam hal ini *Kurdistan Regional Government* memiliki hubungan dengan banyak negara diantaranya Armenia, Austria, Belgia, India, dan lain sebagainya. Selain itu *Kurdistan Regional Government* memiliki Parlemen regional yang terdiri dari 111 kursi dan wilayah Kurdistan Irak secara resmi diperintah oleh *Kurdistan Regional Government*. Daerah Otoritas Kurdistan Irak sendiri meliputi Dohuk, Erbil, Sulaimaniya dan Halabja, dan Erbil dipilih untuk menjadi ibu kota dari wilayah otonom Kurdistan Irak. (<http://dfr.gov.krd/p/p.aspx?p=88&l=12&s=030400&r=403> diakses pada 3 maret 2019).

3.1.1 Tinjauan Konflik Kurdistan Irak - Irak

Konflik yang terjadi antara Kurdistan Irak dengan pemerintah pusat Irak bukanlah sebuah permasalahan yang baru muncul, permasalahan ini sudah muncul jauh dari awal berdirinya Irak sebagai negara merdeka. Latar belakang dari permasalahan konflik yang melibatkan Kurdistan Irak dan pemerintah Irak adalah karena permasalahan tuntutan Kurdistan Irak yang ingin memiliki daerah otonom mereka sendiri dan sebagai langkah awal dalam memerdekakan diri dan lepas dari Irak.

Selama tahun 1959-1960 Mustafa Barzani menjadi kepala Partai Demokrat Kurdistan (PPK) yang diberikan status hukum pada tahun 1960. Namun pada awal 1960 sudah mulai terlihat jelas bahwa Abdul Karim Qasim tidak akan memenuhi janjinya untuk memenuhi kesepakatan tentang otonomi daerah. Hal ini menimbulkan terjadinya perbedaan pendapat dan pandangan yang terjadi didalam komunitas Kurdistan Irak, melihat meningkatnya perbedaan pendapat Kurdi serta kekuatan pribadi Barzani. Abdul Karim Qasim mulai menghasut musuh historis Barzani suku Baradost dan Zebari, yang menyebabkan peperangan intertribal sepanjang 1960 dan awal 1961. Pada Februari 1961 Barzani berhasil mengalahkan kekuatan pro-pemerintah dan mengkonsolidasi posisinya sebagai pemimpin Kurdi. Pada titik ini Mustafa Barzani memerintahkan pasukannya untuk menduduki semua kantor pemerintah di wilayah Kurdi utara dan mengusir para pejabat. Hal ini tidak diterima dengan baik oleh Baghdad, dan Abdul Karim Qasim mulai mempersiapkan serangan militer untuk mendapatkan kembali kendali

pemerintahan di utara Irak (Neria, 2012 : 8-10).

3.1.1.1 Tinjauan Hubungan Irak - Israel

Pada dasarnya Irak tidak mengakui negara Israel sebagai dukungan Irak kepada palestina, hal ini menjadi acuan dasar mengapa Israel dan Irak tidak memiliki hubungan diplomatik. Pada tahun 1948 saat Israel berdiri, Irak menyatakan perang sebagai reaksi dari permasalahan yang melibatkan Israel dan Palestina. Dalam hal ini Irak ikut terlibat untuk memerangi Israel. Melihat permasalahan dengan Irak, Israel menganggap hal tersebut sebagai ancaman nasional dan Israel menanggapi permasalahan tersebut dengan melakukan serangan udara pada Irak melalui Operasi Opera. Dimana sikap Israel ini masih dipertahankan sampai hari ini dengan cara tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Irak (<https://www.timesofisrael.com/35-years-on-iaf-pilots-recall-daring-mission-to-bomb-saddams-nuke-reactor/> diakses pada 3 maret 2019).

3.1.1.1.1 Tinjauan Hubungan Kurdistan Irak - Israel

Kurdistan Irak dan Israel memiliki latar belakang hubungan yang panjang yang sudah dilakukan kedua etnik ini sejak negara Israel belum berdiri di kawasan Timur Tengah. Keberhasilan Israel mendirikan negara non-arab pertama di kawasan Timur Tengah memberikan motivasi tersendiri bagi Kurdi Irak dalam melakukan pemberontakan di Irak dalam rangka untuk mendirikan negara Kurdistan di Irak utara.

Pada tahun 1960 pada saat Kurdistan Irak melakukan gerakan separatisme di Irak, Israel membantu gerakan separatisme yang dilakukan Kurdistan Irak dengan memberikan bantuan-bantuan berupa persenjataan dan pelatihan militer kepada kelompok milisi Kurdistan Irak. Bantuan yang diberikan oleh Israel kepada Kurdistan Irak diakui oleh adanya pernyataan yang dikeluarkan oleh perdana menteri Israel Menachem Begin pada tahun 1980 menyatakan bahwa Israel terlibat dalam membantu pemberontakan yang dilakukan oleh Kurdistan yang dilakukan pada tahun 1965-1975

(<https://www.meforum.org/articles/2014/suprising-ties-between-israel-and-the-kurds> diakses pada 5 September 2018).

Memasuki tahun 1980 muncul sebuah jurnal tentang bagaimana langkah yang harus Israel tempuh untuk menguasai kawasan Timur Tengah dan mendirikan Israel Raya, jurnal ini dipublikasikan pada tahun 1982 dengan judul *A Strategy For Israel In The Nineteen Eighties* yang ditulis oleh Oded Yinon. Jurnal ini mendapat perhatian dari pemimpin Israel pada saat itu namun implementasi dan kelanjutan dari Israel dalam mengadopsi jurnal ini tidak

dipublikasikan secara luas, namun banyak pihak menilai bahwa jurnal ini menjadi rujukan utama petinggi-petinggi militer Israel dalam membuat strategi jika dilihat dari pergerakan-pergerakan yang sudah Israel lakukan. Didalam jurnal ini Kurdistan Irak masuk menjadi salah satu mitra yang dapat Israel manfaatkan dengan melihat jumlah dan posisi Kurdistan Irak yang berpusat disatu titik di kawasan Irak utara, didalam jurnal ini disebutkan bahwa Kurdistan Irak dapat menjadi faktor untuk memecah Irak menjadi dua atau tiga negara melalui konflik sipil yang terjadi di Irak (Yinon, 1982 : 8).

3.1.1.1.1.1 Tinjauan Kepentingan Israel

Secara umum sejak berdirinya daerah otonom Kurdistan Irak di Irak utara pada tahun 2005 menjadikan peluang yang lebih besar bagi Israel dalam melakukan kerjasama dengan Kurdistan Irak dari berbagai sektor kerjasama. Pada dasarnya hubungan kerjasama yang dilakukan oleh Kurdistan Irak dan Israel merupakan kerjasama yang bersifat tertutup dimana hal ini disebabkan oleh status Kurdistan Irak yang sebagai daerah otonom bagian dari Irak, dalam hal ini jika kerjasama yang melibatkan negara lain harus melalui persetujuan dari pemerintah pusat Irak dan tidak dapat dilakukan secara langsung. Sejak runtuhnya Saddam Hussein di Irak karena masuknya Amerika, kemunculan konstitusi baru Irak ditahun 2005 menjadikan sebuah peluang besar bagi Israel dalam melihat Kurdistan Irak sebagai mitra di kawasan, dimana dalam konstitusi Irak tahun 2005 berisi tentang pasal-pasal yang mengatur tentang wilayah yang menjadi wilayah sengketa antara Kurdistan Irak dan pemerintah Irak yang diantaranya adalah wilayah Kirkuk.

Setelah berdirinya wilayah otonom Kurdistan Irak isu tentang hubungan Kurdistan Irak dengan Israel kembali muncul, dimana dalam hal ini terdapat keterlibatan perusahaan Israel dalam pembangunan bandara utama Kurdistan Irak di Erbil yang selesai pada tahun 2005. Dalam pembangunan bandara internasional Erbil, terdapat dua perusahaan yang menjadi mitra dalam pembangunan bandara Kurdistan Irak, perusahaan tersebut adalah Motorola dan Magalcom dua perusahaan tersebut dimiliki oleh pengusaha asal Israel yakni Shlomi Michaels. Selain membantu dalam pembangunan bandara di Erbil yang melibatkan perusahaan Israel dalam implementasinya terdapat pengiriman peralatan-peralatan yang dilakukan oleh Israel kepada pemerintah Kurdistan Irak dimana peralatan-peralatan tersebut meliputi, sepeda motor, traktor, sistem untuk meningkatkan senapan Kalashnikov, rompi anti peluru, dan barang-barang pertolongan pertama, dengan sebagian besar produk-produk tersebut dilabeli "Buatan Israel." (Neria, 2012 : 27).

3.1.1.1.1.1 Tinjauan Referendum Kemerdekaan Kurdistan Irak

Hubungan antara pemerintah pusat Irak dan Kurdistan Irak mulai tidak berjalan dengan baik selama periode masa jabatan perdana menteri Irak Nuri al-Maliki yang meliputi periode tahun 2010 sampai 2014 dimana masalah ini diawali dengan tidak adanya anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat Irak kepada pemerintah regional Kurdistan Irak sebanyak 17% dari jumlah anggaran Irak. Dalam hal ini pemerintah pusat Irak memperlakukan tentang adanya kontrak-kontrak yang telah ditandatangani secara sepihak oleh pemerintah regional Kurdistan Irak yang melibatkan perusahaan-perusahaan minyak internasional untuk melakukan investasi dan penjualan minyak tanpa melewati regulasi dan persetujuan pemerintah Irak (Al-Qarawee, 2016 : 4).

Pada bulan april 2017 diadakan pertemuan antara partai-partai Kurdistan Irak yang melibatkan *Kurdistan Democratic Party* (KDP) dan *Patriotic Union of Kurdistan* (PUK) melalui perwakilan partai masing-masing di Erbil, dalam pertemuan ini kedua partai dari *Kurdistan Regional Government* membahas tentang waktu dan mekanisme dalam melaksanakan referendum kemerdekaan Kurdistan Irak. Setelah digelarnya pertemuan antara partai-partai Kurdistan Irak, presiden Kurdistan Irak Massoud Barzani mengumumkan tentang tanggal pelaksanaan referendum kemerdekaan Kurdistan Irak yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 september 2017. Keputusan Massoud Barzani dalam menyatakan referendum kemerdekaan Kurdistan Irak yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 september 2017, dinyatakan pada bulan juni 2017 pada saat pertemuan lanjutan antara partai-partai Kurdistan Irak dalam mendiskusikan lebih lanjut tentang kepastian waktu dalam pelaksanaan referendum kemerdekaan Kurdistan Irak (<http://www.presidency.krd/english/articledisplay.aspx?id=E8ZKw7evZVQ=> diakses pada 11 maret 2019).

3.2 Metode Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti, peneliti menggunakan metode penelitian Kualitatif, dimana data yang diperoleh oleh peneliti didapatkan melalui wawancara, studi pustaka, jurnal dan dokumentasi serta penelusuran data melalui situs-situs berita dalam membantu untuk melakukan validitas data yang diperoleh.

4.1 Analisa Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1.1 Dukungan Nyata Israel Kepada Referendum Kemerdekaan Kurdistan Irak

Dalam menyatakan dukungan secara terbuka setiap negara pasti memiliki

pertimbangan tentang apa saja keuntungan yang akan mereka dapat dari sikap politik yang akan negara tersebut ambil dan tentukan, terutama khususnya dalam masalah ini adalah dukungan Israel terhadap Referendum kemerdekaan Kurdistan. Dalam hal ini dukungan Israel agar Kurdistan Irak merdeka bukanlah sesuatu yang baru dimana jauh sebelum adanya daerah otonom Kurdistan Irak pada 2005 atau lebih dikenal sebagai referendum pertama Kurdistan Irak, Israel dan Kurdistan Irak sudah memiliki hubungan kerjasama yang berlangsung lama dan sudah menjadi rahasia umum di kawasan Timur Tengah.

4.1.1.1 Dukungan Israel Sebelum Referendum Kemerdekaan Kurdistan Irak Tahun 2017

Sebelum dilaksanakannya referendum kemerdekaan Kurdistan Irak pada bulan september 2017, Israel sudah mengambil langkah dan sikap yang jelas dalam melihat permasalahan yang terjadi antara pemerintah Kurdistan Irak dan pemerintah pusat Irak beberapa tahun sebelum dilaksanakannya referendum kemerdekaan Kurdistan Irak ditahun 2017. Ditahun 2014 munculnya kelompok ISIS di kawasan Timur Tengah menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi negara-negara kawasan termasuk Irak dan Kurdistan Irak.

Ditahun 2014 Israel sudah menyatakan dukungan agar Kurdistan Irak merdeka, dinyatakan langsung oleh perdana menteri Israel Benjamin Netanyahu pada tahun 2014 dengan menyatakan bahwa, kita harus mendukung kemerdekaan Kurdi karena orang Kurdi adalah orang - orang yang berperang, dan telah membuktikan komitmen politik mereka, moderasi politik, dan pantas mendapatkan kemerdekaan politik. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Benjamin Nethanyahu saat sedang menjadi pembicara di Universitas Tel Aviv dimana dalam pembahasan sebelumnya Benjamin Netayahu menguraikan tentang permasalahan - permasalahan yang terjadi di kawasan timur tengah dan didalamnya membahas tentang keruntuhan Irak (<https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/06/netanyahu-endorses-kurdish-independence-2014629174546263489.html> diakses pada 25 desember 2018).

Dalam sudut pandang politik pernyataan perdana menteri Israel yang menyatakan mendukung agar Kurdistan Irak merdeka tidak dapat dikatakan sebagai pendapat atau sikap pribadi dari Benjamin Nethayahu dimana hal ini ditegaskan dan diperkuat oleh jabatan Benjamin Nethayahu sebagai perdana menteri Israel dimana setiap pernyataan yang dikeluarkan oleh perdana menteri harus diperhitungkan dengan matang karena posisi jabatan politik yang dimiliki akan merepresentasikan sebagai pernyataan dari

sebuah negara tersebut dimana dalam hal ini adalah Israel.

Setelah munculnya pernyataan dari perdana menteri Israel masih ditahun yang sama, Presiden Israel Shimon Peres kembali ikut membahas tentang permasalahan kemerdekaan Kurdistan Irak pada saat melakukan pertemuan dengan pemerintah Amerika Serikat, dimana Shimon Peres mengambil langkah yang jauh lebih serius dalam memberikan dukungan kepada kemerdekaan Kurdistan Irak, dalam hal ini Shimon Peres menyarankan langsung kepada Amerika Serikat agar terlibat campur tangan dalam mendukung kemerdekaan Kurdistan Irak dan mendukung pembentukan negara Kurdistan di Irak, Shimon Peres dalam hal ini memuji tentang demokrasi yang diterapkan di wilayah Kurdistan Irak dan dalam hal ini Shimon Peres menyatakan bahwa orang Kurdi secara *de facto* telah menciptakan negara mereka sendiri yang bersifat demokratis dimana salah satu indikator demokratis adalah memberi kesetaraan kepada wanita

(<http://www.rudaw.net/english/kurdistan/29092016> diakses pada 11 maret 2019).

Keseriusan Israel dalam mendukung Kurdistan Irak untuk merdeka dapat dikatakan sebagai dukungan yang bersifat serius dimana hal tersebut dapat dilihat dari Perdana Menteri Israel Benjamin Nethanyahu yang menyatakan dukungan kemerdekaan Kurdistan Irak di dalam Israel dan Presiden Israel Shimon Peres yang menyarankan secara langsung kepada Amerika Serikat tentang kemerdekaan Kurdistan yang harus didukung oleh Amerika Serikat dimana dalam hal ini Amerika Serikat dinilai memiliki pengaruh yang sangat besar dalam melancarkan pembentukan negara Kurdistan Irak.

Memasuki tahun 2015, pada tahun-tahun ini dimana masih kuatnya kelompok teroris ISIS di kawasan Timur Tengah yang melibatkan Irak dan Kurdistan Irak, dalam permasalahan ini Irak dan Kurdistan Irak memiliki beberapa wilayah strategis yang dikuasai oleh kelompok ISIS. Ditahun ini terlepas dari dukungan Israel yang bersifat politis untuk membantu agar Kurdistan Irak merdeka, Israel juga melakukan dukungan yang bersifat finansial dimana hal ini diketahui dengan munculnya data penjualan minyak yang dilakukan oleh pemerintah Kurdistan Irak dan Israel pada tahun 2015, dimana dalam laporan tersebut yang diterbitkan oleh *Financial Times* disebutkan bahwa pada tahun 2015 diperkirakan sekitar 77% kebutuhan minyak nasional Israel didatangkan dari wilayah Kurdistan Irak (<https://www.ft.com/content/150f00cc-472c-11e5-af2f-4d6e0e5eda22> diakses pada 11 maret 2019).

Adanya laporan tentang penjualan minyak yang dilakukan oleh pemerintah

regional Kurdistan Irak dan Israel tahun 2015 tidak bisa dilepaskan dari langkah Israel dalam mendukung Kurdistan Irak merdeka, dimana hal tersebut dapat membantu Kurdistan Irak untuk tetap menjalankan pemerintahan tanpa harus mengandalkan anggaran dari pemerintah pusat Irak, dengan kata lain dalam masalah ini Israel dapat dikatakan membantu Kurdistan Irak secara finansial dan tidak menutup kemungkinan bahwa penjualan minyak yang dilakukan antara Kurdistan Irak dan Israel tidak hanya dilakukan pada tahun 2015.

4.1.1.1 Dukungan Israel Terhadap Referendum Kemerdekaan Kurdistan Irak Tahun 2017

Israel menjadi negara pertama dan satu satunya yang mendukung adanya referendum kemerdekaan yang dilakukan oleh pemerintah regional Kurdistan Irak pada bulan september 2017 lalu. Dalam melihat referendum kemerdekaan yang dilaksanakan oleh Kurdistan Irak, melalui menteri kehakiman Israel Ayelet Shaked menyatakan bahwa Israel mendukung langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah regional Kurdistan Irak dalam memerdekakan diri dari Irak. Dukungan secara terbuka yang disampaikan oleh menteri kehakiman Israel Ayelet Shaked memicu banyak kecaman keras dari negara-negara yang berada di kawasan Timur Tengah diantaranya Turki, dan Iran. Negara-negara seperti Turki, Iran dan Irak menilai bahwa adanya peran dan campur tangan Israel dalam mendorong terjadinya referendum kemerdekaan yang dilakukan oleh Kurdistan Irak.

Tuduhan tentang adanya Israel dibalik referendum kemerdekaan yang dilaksanakan oleh pemerintah regional Kurdistan Irak tersebut bukanlah menjadi hal yang baru bagi negara-negara kawasan Timur Tengah, hal ini didasari oleh adanya hubungan kerjasama yang bersifat tidak resmi yang sudah dilakukan antara Israel dan Kurdistan Irak sejak Kurdistan Irak masih menjadi kelompok separatis dan setelah berdirinya daerah otonom Kurdistan Irak. Diawali dengan munculnya pemberitaan tentang referendum kemerdekaan Kurdistan Irak, yang dalam implementasinya terdapat pengibaran bendera Israel dihari pelaksanaan referendum kemerdekaan Kurdistan Irak 2017 (<https://www.timesofisrael.com/iraq-bans-israeli-flags-after-kurds-wave-them-at-independence-rallies/> diakses pada 11 maret 2019).

Tuduhan negara-negara kawasan tentang adanya campur tangan Israel dalam pelaksanaan referendum kemerdekaan Kurdistan Irak ditanggapi langsung oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Nethanyahu yang menyatakan bahwa, Israel tidak ikut campur dan terlibat secara langsung dan tidak terlibat dalam memberi dukungan secara material dimana Israel menyatakan dukungan

terbuka kepada kemerdekaan Kurdistan Irak karena faktor simpati yang dalam serta alami terhadap Kurdistan Irak yang berusaha untuk mendapatkan kemerdekaan sudah sejak lama. Selain faktor simpati yang dijadikan argumen dasar mengapa Israel mendukung Kurdistan Irak merdeka, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan akan membantu untuk menegosiasikan permasalahan Kurdistan Irak kepada pemimpin-pemimpin negara lainnya, dengan tujuan untuk menghindari adanya aksi kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat Irak kepada Kurdistan Irak.

Dalam langkah selanjutnya, Israel yang diwakili oleh menteri intelijen Katz, dimana menteri Katz menyatakan bahwa isu saat ini yang menjadi prioritas Israel adalah untuk mencegah terjadinya serangan kepada Kurdistan Irak, memusnahkan suku Kurdi, dan segala sesuatu yang akan menyebabkan kerugian terhadap Kurdistan Irak dan wilayah otonom Kurdistan Irak baik dari pemerintah pusat Irak atau negara-negara yang berbatasan dengan wilayah otonom Kurdistan Irak. Dalam masalah ini Israel melibatkan Amerika Serikat, Rusia, Jerman dan Prancis untuk mencegah terjadinya konflik bersenjata baru akibat digelarnya referendum kemerdekaan Kurdistan Irak (<https://www.timesofisrael.com/netanyahu-said-to-be-lobbying-world-leaders-to-support-kurds/> diakses pada 1 januari 2019).

Dalam hal ini langkah Israel yang tetap berada dipihak Kurdistan Irak sangat menjelaskan bahwa dukungan Israel kepada kemerdekaan Kurdistan Irak bukanlah hanya sebuah wacana, dimana dari tahun 2014 Israel sudah menyatakan tentang dukungan agar Kurdistan Irak merdeka dan melakukan dukungan lain melalui finansial lewat pembelian minyak, setelah dilaksanakannya referendum kemerdekaan Kurdistan Irak pada september 2017 Israel tetap pada posisi yang sama, meskipun posisi Israel berada pada posisi yang tidak diuntungkan karena Amerika Serikat tidak ikut campur tangan dalam permasalahan kemerdekaan Kurdistan Irak seperti yang diharapkan Israel.

4.1.2 Keuntungan Israel Dalam Mendukung Referendum Kemerdekaan Kurdistan Irak

Mayoritas etnik Kurdi yang berada di Irak menjadikan perhitungan utama Israel, mengapa Israel selalu berada dipihak Kurdistan Irak dimana dalam hal ini Israel diuntungkan karena mayoritas etnik Kurdistan Irak sudah lama memberontak kepada pemerintah pusat dalam permasalahan menuntut kemerdekaan mereka. Karakteristik Kurdistan Irak yang berbeda dengan Kurdi di negara Turki dan Iran menjadikan nilai lebih bagi Israel untuk mendukung referendum kemerdekaan Kurdistan Irak, dimana latar belakang kerjasama antara Israel dan Kurdistan Irak sudah dilakukan sejak lama dan pasca

berdirinya daerah otonom Kurdistan Irak pada 2005 kerjasama antara Israel dan Kurdistan Irak tetap berjalan meskipun dilakukan secara tertutup, hal ini didasari karena posisi Irak yang tidak mengakui Israel sebagai sebuah negara.

Perbedaan Karakteristik Kurdistan Irak yang lebih militan dalam melakukan pemberontakan dalam menuntut kemerdekaan kepada pemerintah pusat Irak tersebut menjadi modal utama Israel dalam melihat keuntungan yang bisa didapatkan dengan mendukung referendum kemerdekaan Kurdistan Irak dimana hal tersebut sudah menjadi strategi sejak awal berdirinya Israel yang lebih dikenal dengan sebutan *Peryphery Doctrine*, selain hal tersebut adanya Israel dipihak Kurdistan Irak dapat memberikan peluang lebih bagi Kurdistan Irak karena posisi Israel yang secara politis cukup kuat dalam melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat yang dimana Amerika Serikat pernah membantu Kurdistan Irak dalam pembentukan wilayah otonom Kurdistan Irak. Selain hal tersebut pasca berdirinya daerah otonom Kurdistan Irak, Amerika menjadi negara yang banyak terlibat campur tangan dalam permasalahan-permasalahan di negara-negara Timur Tengah.

4.1.2.1 Keuntungan Israel Dalam Mendukung Referendum Kemerdekaan Kurdistan Irak Secara Politik

Secara garis besar hubungan antara Kurdistan Irak dan Israel bukanlah sesuatu yang baru dimana Israel selalu berada dipihak Kurdistan Irak sejak sebelum berdirinya wilayah otonom Kurdistan Irak. Secara politis strategi Israel dalam mendukung Kurdistan Irak agar merdeka sudah sangat jelas karena posisi Israel dikawasan Timur Tengah yang merupakan negara *Periphery* dan memiliki kesamaan etnik dengan Kurdistan Irak dan hal tersebut didorong oleh faktor strategi politik luar negeri Israel yang dinamai *Periphery Doctrine*, dimana dalam hal ini Israel harus memiliki aliansi atau kerjasama dengan negara-negara non-arab dan dalam hal ini Kurdistan Irak bukanlah etnik arab seperti mayoritas di negara kawasan Timur Tengah lainnya.

Keberadaan Kurdistan Irak memberikan keuntungan bagi Israel karena Israel dapat memiliki aliansi yang berada dikawasan Timur Tengah dengan hal tersebut Israel dapat menciptakan *balance of power* jika nantinya Kurdistan Irak menjadi sebuah negara merdeka. Dengan kata lain, posisi Israel akan selalu sama jika dihadapkan kepada permasalahan kemerdekaan Kurdistan Irak dan akan selalu cenderung sama dalam mendukung pendirian negara Kurdistan Irak. Selain masalah kebutuhan Israel tentang aliansi di kawasan Timur Tengah untuk menciptakan *balance of power*, keuntungan lain yang didapat oleh Israel dalam mendukung kemerdekaan Kurdistan Irak dan referendum kemerdekaan Kurdistan Irak

adalah agar Israel dapat bergerak dengan leluasa di wilayah Kurdistan Irak dengan tujuan-tujuan spionase untuk melihat perkembangan dan pergerakan negara-negara yang berada disekitar wilayah Kurdistan Irak dengan tujuan untuk mendapatkan informasi-informasi yang diperlukan Israel.

Permasalahan tentang sikap Israel yang memposisikan diri sebagai pendukung pertama dan satu-satunya dalam melihat referendum kemerdekaan Kurdistan Irak sudah dijelaskan dalam jurnal Oded Yinon yang berjudul *A Strategy for Israel in the Nineteen Eighties*, dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa Kurdistan Irak dapat dijadikan mitra atau aliansi Israel dikawasan Timur Tengah dengan tujuan besar dari jurnal tersebut untuk memecah negara-negara di kawasan Timur Tengah sehingga Israel mempunyai pengaruh secara politis dikawasan Timur Tengah. Keuntungan Israel dalam jurnal tersebut akan didapat dengan cara harus mendukung kelompok-kelompok separatis di kawasan Timur Tengah, dimana salah satunya pada saat itu status Kurdistan Irak masih menjadi kelompok separatis. Adanya kelompok separatis dikawasan Timur Tengah memberikan keuntungan bagi Israel untuk membantu memecah belah negara-negara di kawasan Timur Tengah lewat konflik horizontal, sehingga dapat membuka peluang munculnya negara-negara baru yang dapat dijadikan mitra dan menaikan posisi Israel dimana status awal Israel sebagai negara *Periphery* menjadi negara yang diperhitungkan dan memiliki pengaruh secara politik di kawasan Timur Tengah (Yinon, 1982 : 8).

Selain posisi Israel sebagai negara *Periphery* di kawasan Timur Tengah Israel juga mendapatkan banyak keuntungan dari Kurdistan Irak dengan bebasnya keluar masuk wilayah Kurdistan Irak atau bahkan untuk membangun pangkalan militer Israel di wilayah Kurdistan Irak jika Kurdistan Irak merdeka, hal tersebut menjadi faktor mengapa Israel memberikan dukungan kepada kemerdekaan Kurdistan Irak. Selain itu dengan mendukung referendum kemerdekaan Kurdistan Irak, pemerintah Israel diberikan sebuah keuntungan dengan dapat menciptakan dan memperburuk konflik yang terjadi antar etnik di kawasan Timur Tengah terutama Irak dan negara-negara yang memiliki etnik Kurdi di dalam negara mereka. Dengan mendukung kemerdekaan Kurdistan Irak, Israel dapat mempengaruhi stabilitas keamanan dan politik terhadap negara-negara arab terganggu dan membuat negara-negara seperti Turki dan Iran yang dimana kedua negara tersebut memiliki etnik Kurdi di dalam negara mereka menyebabkan kekhawatir dalam melihat perkembangan dari Kurdistan Irak, karena dengan terus berkembangnya Kurdistan Irak secara tidak langsung akan mendorong hal yang serupa bagi

etnik Kurdi di Iran dan Turki dalam menuntut hal yang sama (Seyed & Shahram, 2017 : 2).

4.1.2.2 Keuntungan Israel Dalam Mendukung Referendum Kemerdekaan Kurdistan Irak Secara Ekonomi

Selain permasalahan status Israel sebagai negara *Periphery* di kawasan Timur Tengah, kebutuhan minyak menjadi salah satu faktor mengapa Israel selalu berada dipihak Kurdistan Irak khususnya dalam hal mendukung kemerdekaan Kurdistan Irak, minyak menjadi salah satu senjata utama negara-negara di kawasan Timur Tengah dalam melawan Israel pada awal-awal berdirinya negara Israel, hal ini dilakukan karena Israel tidak memiliki sumber minyak dan tidak adanya kerjasama yang dilakukan antara Israel dengan negara-negara kawasan Timur Tengah pada awal-awal berdirinya negara Israel, sehingga dalam masalah kebutuhan minyak nasional Israel harus mendatangkan dari luar kawasan dan tentunya hal tersebut membutuhkan biaya lebih untuk mendatangkan minyak tersebut.

Keberadaan Kurdistan Irak dan keinginan Kurdistan Irak untuk merdeka menjadi keuntungan besar bagi Israel dalam menghadapi masalah kebutuhan minyak, karena dengan mendukung Kemerdekaan Kurdistan Irak, Israel dapat mendapatkan pasokan minyak yang berasal dari kawasan Timur Tengah sehingga Israel tidak perlu mengeluarkan biaya lebih untuk mendatangkan minyak dari negara-negara diluar kawasan Timur Tengah. Munculnya kelompok ISIS menjadi momentum penting bagi Israel dalam memenuhi kebutuhan minyak nasional melalui pemerintah Kurdistan Irak dimana pemerintah Kurdistan Irak dihadapkan pada keadaan sulit dimana harus memerangi kelompok ISIS, dan sudah tidak diberi anggaran belanja daerah oleh pemerintah pusat Irak. Hal tersebut terbukti dengan munculnya laporan pembelian minyak yang dilakukan oleh Israel dari Kurdistan Irak pada tahun 2015 dimana tidak menutup kemungkinan ditahun-tahun sebelumnya atau tahun berikutnya perdagangan minyak antara Israel dan Kurdistan Irak masih mungkin dilakukan kedua belah pihak.

Dalam permasalahan kebutuhan minyak, Israel dapat dikatakan sebagai negara yang membutuhkan banyak minyak untuk memenuhi kebutuhan minyak nasional, dimana hal ini didasari dengan adanya perjanjian perdamaian yang dilakukan antara Israel dan Mesir dengan konsekuensi Israel harus menyerahkan ladang minyak Alma yang berada di Sinai selatan kepada Mesir. Perjanjian damai yang dilakukan oleh Israel dan Mesir berujung kepada konsekuensi bahwa Israel harus mengimpor minyak dari berbagai wilayah untuk memenuhi kebutuhan minyak Israel. Dalam pemenuhan kebutuhan minyak nasional, Israel mendatangkan minyak dari negara-

negara seperti, Angola, Kolombia, Meksiko, Mesir, dan Norwegia. Dimana pada tahun 2012 mayoritas minyak mentah Israel didatangkan dari Rusia dan Azerbaijan (<https://www.jewishvirtuallibrary.org/oil-and-natural-gas-in-israel> diakses pada 3 Maret 2019).

Dalam kebutuhan konsumsi minyak nasional, Israel membutuhkan rata-rata 246.000 barel minyak perhari selama rentang waktu tahun 2000-2011, dan kebutuhan minyak tertinggi Israel terjadi pada tahun 2011 dengan kebutuhan mencapai 263,000 barel perhari. Dalam melihat masalah kebutuhan minyak ini, Israel memanfaatkan keberadaan Kurdistan Irak yang sedang mengalami permasalahan dengan pemerintah pusat Irak, dimana pada tahun 2015 muncul laporan tentang penjualan minyak yang dilakukan oleh Kurdistan Irak kepada Israel.

Keuntungan Israel dalam mendukung referendum kemerdekaan Kurdistan Irak dalam rangka memenuhi kebutuhan minyak nasional bukanlah tanpa alasan, hal ini dapat dilihat dari posisi ke 8 Irak dalam negara yang memiliki sumber daya alam minyak terbesar di dunia, dan mayoritas minyak Irak berada di wilayah Kirkuk dan wilayah ini secara administratif merupakan wilayah pemerintah pusat Irak namun dalam pengelolaan minyak dilakukan oleh pemerintah Kurdistan Irak. Selain hal tersebut pendudukan wilayah Kirkuk oleh pemerintah Kurdistan Irak menjadi keuntungan besar yang didapat Israel jika pada akhirnya wilayah tersebut menjadi wilayah Kurdistan Irak secara resmi. Dalam hal ini status Kirkuk yang masih menjadi wilayah sengketa pasca masuknya Amerika ke Irak dan munculnya konstitusi baru Irak pada tahun 2005, hal tersebut menjadikan pertimbangan lebih bagi Israel dalam mendukung kemerdekaan Kurdistan Irak, dalam melihat permasalahan tersebut pemerintah Kurdistan Irak selalu menjadikan pasal 140 dalam konstitusi Irak tahun 2005 sebagai acuan dalam melegalkan eksplorasi mereka khususnya dalam sektor minyak di wilayah-wilayah yang statusnya masih disengketakan.

Selain itu dalam konteks ini posisi Irak yang tidak mengakui Israel sebagai negara dan tidak adanya hubungan diplomatik antara Israel dan Irak, memberikan kebebasan bagi Israel untuk menghindari tuntutan dari pemerintah pusat Irak dalam hal pembelian minyak yang dieksplorasi di wilayah Kirkuk dimana hal tersebut bersifat melanggar regulasi pemerintah pusat, karena pemerintah pusat Irak hanya dapat menuntut perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pembelian minyak ilegal, yang melibatkan Kurdistan Irak didalamnya dan harus melalui mekanisme secara resmi dengan pemerintah pusat Irak. Karena itu Israel selalu mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh Kurdistan Irak dalam rencana memerdekakan diri dari Irak karena banyaknya

faktor yang dapat menjadi keuntungan Israel jika Kurdistan Irak menjadi negara merdeka, terutama faktor wilayah yang banyak menjadi sengketa antara pemerintah pusat Irak dan pemerintah regional Kurdistan, serta kepentingan politik Israel yang membutuhkan negara aliansi di kawasan Timur Tengah.

4.1.3 Langkah Irak Dalam Menyikapi Masalah Referendum Kemerdekaan Kurdistan Irak

Secara politis pemerintah Irak mengeluarkan pernyataan dan langkah yang tegas dalam menghadapi permasalahan referendum Kurdistan Irak yang ingin memerdekakan diri dari Irak, dimana pemerintah Irak menyatakan menentang dan tidak mengakui referendum kemerdekaan yang dilakukan oleh Kurdistan Irak, dan menyatakan bahwa pemerintah Irak siap melakukan berbagai cara termasuk melakukan intervensi militer jika pemerintah Kurdistan Irak tetap ingin memisahkan diri dari Irak.

Dari sikap dan reaksi yang ditunjukkan oleh pemerintah pusat Irak dapat dilihat bahwa referendum kemerdekaan Kurdistan Irak secara politis dan keamanan mampu membuat keadaan Irak menjadi tidak stabil, meskipun potensi untuk terjadinya konflik bersenjata baru yang melibatkan Kurdistan Irak dan Irak dapat dikatakan memiliki peluang yang kecil. Sikap dari pemerintah pusat Irak yang sangat mengecam kepada referendum kemerdekaan Kurdistan Irak bukanlah tanpa sebab, karena jika referendum kemerdekaan Kurdistan Irak berhasil dan benar-benar terealisasikan hal tersebut akan sangat merugikan Irak secara politis dan dengan telak akan melemahkan posisi pemerintah Irak. Dalam hal ini permasalahan referendum kemerdekaan Kurdistan Irak dikhawatirkan akan mengakibatkan munculnya konflik baru khususnya antara pemerintah pusat Irak dengan pemerintah regional Kurdistan Irak, dan karena adanya masalah tersebut akan dianggap menurunkan efektivitas Irak dan Kurdistan Irak dalam memerangi kelompok teroris ISIS yang menjadi salah satu permasalahan besar di kawasan Timur Tengah pada saat itu.

Langkah cepat yang diambil oleh pemerintah pusat Irak dalam melihat masalah referendum kemerdekaan Kurdistan bukan tanpa sebab, hal tersebut dipicu oleh banyaknya wilayah-wilayah Irak yang berbatasan dengan wilayah otonom Kurdistan Irak yang dikelola oleh Kurdistan Irak dimana wilayah-wilayah tersebut masih dalam status sengketa pasca adanya konstitusi Irak tahun 2005 setelah runtuhnya Saddam Hussein, dan tidak menutup kemungkinan akan munculnya klaim terhadap wilayah-wilayah tersebut jika Kurdistan Irak merdeka.

Pada kenyataannya wilayah tradisional dari Kurdistan Irak tidak sebesar wilayah

Kurdistan Irak saat ini, banyaknya wilayah Irak yang diklaim oleh pemerintahan regional Kurdistan Irak dan di duduki oleh Pashmegra sebagai tentara keamanan Kurdistan Irak di wilayah-wilayah tersebut menjadi masalah mendasar dalam pengambilan langkah cepat yang dilakukan oleh pemerintah Irak, dimana salah satunya adalah wilayah Kirkuk yang menjadi salah satu alasan mengapa pemerintah pusat Irak bergerak cepat dalam menghadapi masalah referendum kemerdekaan Kurdistan Irak, dalam hal ini Kirkuk sebagai salah satu wilayah penghasil minyak Irak dan dianggap sebagai Yerusalem oleh Kurdistan Irak, dimana hal tersebut menimbulkan sentimen tersendiri bagi Irak karena status wilayah tersebut selalu dijadikan acuan sebagai wilayah yang belum jelas oleh pemerintah Kurdistan Irak.

Dalam melemahkan posisi pemerintah regional Kurdistan Irak setelah diadakan referendum kemerdekaan Kurdistan pada 2017, dalam permasalahan ini pemerintah Irak mengambil langkah dengan merebut kembali Kirkuk yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah Kurdistan Irak dengan mengerahkan angkatan militer Irak untuk mengeluarkan tentara Pashmegra yang berada di Kirkuk pasca keberhasilan tentara Pashmegra dalam merebut kembali Kirkuk dari ISIS dengan melibatkan bantuan dari tentara Amerika dalam perebutan wilayah tersebut (<https://www.npr.org/selections/thetwo-way/2017/10/16/558006584/iraq-sends-troops-to-take-areas-south-of-kirkuk-back-from-kurds> diakses pada 2 januari 2019).

Terlepas dari permasalahan pendudukan wilayah atau invasi wilayah yang dilakukan oleh pemerintah regional Kurdistan Irak, adanya pernyataan dari pemerintah pusat Irak yang mengancam akan menutup pipa-pipa minyak yang dikelola oleh pemerintah regional Kurdistan Irak di perbatasan-perbatasan negara agar Kurdistan Irak terisolasi dengan tujuan agar pemerintah regional Kurdistan Irak tidak mendapatkan hasil dari penjualan minyak sebagai pondasi ekonomi untuk menjalankan pemerintahan dan kebutuhan pangan orang orang Kurdi Irak yang berada di wilayah Kurdistan Irak. Dalam hal ini Iran dan Turki ikut mengancam dan mengancam akan menutup keluar masuknya perbatasan sehingga daerah otonom Kurdistan Irak terisolasi secara penuh. Munculnya ancaman dari Irak, Iran dan Turki dalam rencana untuk mengisolasi Kurdistan Irak lewat jalur-jalur perbatasan membuat posisi pemerintah regional Kurdistan Irak semakin sulit, dimana permasalahan ekonomi yang akan dihadapi jika hal tersebut terjadi akan menjadi masalah yang berat bagi pemerintah regional Kurdistan, pasalnya hanya penjualan minyak yang dilakukan oleh pemerintah regional Kurdistan saja yang dapat diandalkan oleh pemerintah regional Kurdistan

Irak dan menjadi sumber ekonomi dalam menjalankan pemerintahan.

Setelah kegagalan dalam memerdekakan diri dari Irak, presiden regional Kurdistan Irak Massoud Barzani memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai bukti kegagalan dirinya dalam memerdekakan Kurdistan Irak, dimana Massoud Barzani menjadi inisiator dalam rencana pendirian negara Kurdistan Irak yang dilakukan melalui proses referendum pada tahun 2017.

Ambisi Massoud Barzani dalam memerdekakan Kurdistan Irak jika ditinjau dari situasi saat perencanaan referendum kemerdekaan Kurdistan tahun 2017 dapat dikatakan terlalu terburu-buru dalam menentukan waktu, dimana sebelum dilaksanakan referendum kemerdekaan Kurdistan 2017, Amerika Serikat dan pemerintah pusat Irak sudah menyatakan penolakan pada referendum kemerdekaan tersebut, namun dalam hal tersebut Massoud Barzani tetap melaksanakan referendum kemerdekaan Kurdistan sesuai dengan perencanaan setelah digelarnya pertemuan antara partai-partai Kurdistan Irak pada 2017 (<https://www.aljazeera.com/news/2017/10/massoud-barzani-step-krp-president-171029161347180.html> diakses pada 3 maret 2019).

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang sudah dipaparkan tentang apa yang menjadi kepentingan Israel dalam mendukung referendum kemerdekaan Kurdistan Irak 2017, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Hubungan antara Israel dan Kurdistan Irak sudah dilakukan sejak tahun 1960 dimana sikap Israel dalam mendukung Kurdistan Irak merdeka bukanlah hal yang baru bagi Irak dimana sejak status Kurdistan Irak masih menjadi kelompok separatis Israel sudah ikut berperan dalam membantu Kurdistan Irak dalam melakukan pemberontakan kepada pemerintah pusat Irak.

Langkah nyata Israel dalam mendukung kemerdekaan Kurdistan Irak sudah dilakukan sejak tahun 2014 beberapa tahun sebelum digelarnya referendum kemerdekaan Kurdistan Irak di tahun 2017, secara politis Israel membutuhkan mitra di kawasan Timur Tengah dengan tujuan untuk menguatkan posisi Israel dikawasan untuk membuktikan bahwa Israel mempunyai pengaruh politik di kawasan Timur Tengah dengan cara memecah belah negara-negara di kawasan Timur Tengah dan salah satunya dengan mendukung Kurdistan Irak merdeka. Selain itu Kebutuhan minyak yang menjadi kebutuhan dasar Israel menjadikan Israel tetap pada tujuan utama mereka untuk mendukung Kurdistan Irak merdeka, karena dengan sikap tersebut Israel dapat memperoleh

minyak dari kawasan Timur Tengah tanpa harus mengimpor dari luar kawasan.

Selain masalah tersebut dalam hal ini terdapat masalah mendasar yang membuat pemerintah pusat Irak mengambil langkah cepat, dimana masalah ini dikarenakan permasalahan wilayah-wilayah Irak yang banyak dalam status sengketa setelah masuknya Amerika ke Irak serta permasalahan wilayah yang dikelola dan diklaim oleh pemerintah regional Kurdistan Irak. Perebutan kembali Kirkuk pada akhirnya terbukti mampu mengurungkan niat Kurdistan Irak dalam memerdekakan diri dimana hal ini ditandai dengan mundurnya Massoud Barzani sebagai presiden dan kembalinya diadakan negosiasi perwakilan pemerintah Kurdistan Irak untuk kembali masuk kedalam parlemen pemerintah pusat Irak.

5.2 Rekomendasi

Untuk referendum kemerdekaan Kurdistan Irak, hubungan politik dan permasalahan wilayah yang banyak diklaim pemerintah regional Kurdistan Irak masalah terbesar mengapa referendum tersebut gagal. Jika dalam pengambilan keputusan dalam melakukan referendum dilakukan dengan cara bernegosiasi seperti pada tahun 2005, tidak menutup kemungkinan jika referendum kemerdekaan Kurdistan Irak dapat berhasil, dengan kata lain harus menggunakan jalur politik.

Untuk dukungan Israel dalam referendum kemerdekaan Kurdistan Irak, kepentingan politik Amerika yang berbeda dengan kepentingan politik pada tahun 2005 menjadikan tidak ada hasil nyata meskipun Israel ikut berperan dalam referendum kemerdekaan Kurdistan Irak, dengan kata lain momentum dan kepentingan Amerika yang harusnya dimanfaatkan oleh Israel.

Untuk peneliti lain yang hendak melakukan penelitian khususnya tentang Israel dan Kurdistan Irak diharapkan dapat menyajikan data dan analisa yang lebih akurat terkait permasalahan referendum kemerdekaan Kurdistan Irak dan dukungan Israel didalamnya ataupun dukungan dari negara lain. Selain hal tersebut peneliti lain diharapkan mampu melakukan kajian dari permasalahan dan sudut pandang yang berbeda dan menggunakan variabel penelitian yang berbeda dimana nantinya diharapkan dapat memperluas pengetahuan bagi peneliti dan pembaca.

Daftar Pustaka

A. Acuan dari buku:

- A middle East Watch Report. 1993. Genocide in Iraq, The Anfal Campaign Against the Kurds. New York: Human Right Watch.
- Darmayadi. & Dkk. 2015. Mengenal Studi Hubungan Internasional. Bandung: Zavara.
- Sitepu, Anthonius. 2011. Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Torelli, Stefano M. 2016. Kurdistan An Invisible Nation: Kurdistan and the Middle East. Historical Divisions and Internal Plots. The Italian Institute for International Political Studies (ISPI): Milan.
- Wahab, Abdul Jamil. 2014. Manajemen Konflik Keagamaan Analisis Latar Belakang Konflik Keagamaan Aktual. Jakarta: Elex Media Komputindo Kompas-Gramedia.

B. Karya Ilmiah

- Al-Qarawee. 2016. From Maliki to Abadi: The chalege of iraq prime minister. Crown Center for middle east studies. Brandeis University.
- Bengio, Ofra. 2014. *Surprising Ties between Israel and the Kurds*. Middle East Quarterly.
- Ford, Patrick & Kemokai, Tiangay. 2014. Direct Democracy: A Global Comparative Study on Electoral Initiative and Referendum Mechanisms. By the University of the Pacific, McGeorge School of Law.
- Neriah, Jacques. 2012. The future of Kurdistan: Between Turkey, Iraq War, and Syirian Revolt. Jerusalem Center for Public Affairs. Jerusalem Israel. ISBN 978-965-218-109-1.
- Mulyana, Budi. 2018. *Religion and International Relations. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 225. International Conference on Business, Economic, Social Sciences and Humanities (ICOBEST 2018). Published by Atlantis Press.*
- Ryabinin, Yevgeny. 2017. *The Basic Causes Of Th Contemporary Separatism Journal of Geography, Politics and Society 2017, International Affairs and Foreign Policy Chair, Mariupol State University, Stroiteley 129, 87500 Mariupol, Ukraine.*
- Seyed & Shahram. 2017. *Kurdistan Privacy Government and Efforts to Riddance from Geopolitical Restrictions. Department of Political Science,*

Faculty of Law and Politics, Science and Islamic Azad university, Tehran, Iran DOI: 10.4172/2332-0761.1000240.

- Yinon, Oded. 1982 "A Strategy for Israel in the Nineteen Eighties". Published by the Association of Arab-American University Graduates, Inc. Belmont, Massachusetts, 1982 Special Document No. 1 (ISBN 0-937694-56-8).

C. Rujukan Elektronik

- Agregasi Sindonews.com. 2017. Wah! Akui Punya Kepentingan, Israel Dukung Kurdi Merdeka dari Irak. Melalui: <https://news.okezone.com/read/2017/09/12/18/1774076/wah-akui-punya-kepentingan-israel-dukung-kurdi-merdeka-dari-irak> [Pada 13 maret 2018].
- Al-Rubaye, Ahmad. 2017 Iraqi Troops Enter Kirkuk, Seeking To Take Oil-Rich Area Back From Kurds. Melalui: <https://www.npr.org/selections/thetwo-way/2017/10/16/558006584/iraq-sends-troops-to-take-areas-south-of-kirkuk-back-from-kurds> [Pada 2 januari 2019]
- Aljazeera. 2014. Netanyahu endorses Kurdish independence. Melalui: <https://www.aljazeera.com/news/middle-east/2014/06/netanyahu-endorses-kurdish-independence-2014629174546263489.html> [Pada 25 desember 2018].
- Aljazeera. 2017. Masoud Barzani to step down as KRG president. Melalui: <https://www.aljazeera.com/news/2017/10/masoud-barzani-step-krp-president-171029161347180.html> [pada 3 maret 2019].
- Bengio, ofra. 2014. Surprising Ties between Israel and the Kurds. Melalui: <https://www.meforum.org/articles/2014/suprising-ties-between-israel-and-the-kurds> [Pada 12 maret 2018 & 5 september 2018].
- David Sheppard, John Reed and Anjli Raval. 2015. Israel turns to Kurds for three-quarters of its oil supplies. Melalui <https://www.ft.com/content/150f00cc-472c-11e5-af2f-4d6e0e5eda22> [diakses pada 11 maret 2019].
- Department of Foreign Relations. Kurdistan Regional Government. Melalui: <http://dfr.gov.krd/p/p.aspx?p=88&l=12&s=030400&r=403> [diakses pada 3 maret 2019].
- Jewish Virtual Library. Melalui: <https://www.jewishvirtuallibrary.org/oil-and-natural-gas-in-israel> [Pada 3 Maret 2019].
- Kurdistan Regional Government. Contemporary history. Melalui: <http://cabinet.gov.krd/p/page.aspx?l=12>

- &s=050000&r=306&p=216 [Pada 13 maret 2018].
- Kurdistan Region Presidency. 2017. President Barzani Meets with Kurdistan Region's Political Parties to Set the Date for the Referendum. Melalui: <http://www.presidency.krd/english/articledisplay.aspx?id=E8ZKw7evZVQ=> [Pada 11 maret 2019].
- Ratnasari, Yuliana. 2017. Referendum Kurdi: 93% Warga Memilih Merdeka dari Irak. Melalui: <https://tirto.id/referendum-kurdi-93-warga-memilih-merdeka-dari-irak-cxqD> [Pada 13 Maret 2018].
- Rudaw. 2016. Kurds pay respect to Israel's Shimon Peres in Duhok memorial service. Melalui: <http://www.rudaw.net/english/kurdistan/29092016> [Pada 11 maret 2019].
- Staff, Toi. 2016. 35 years on, IAF pilots recall daring mission to bomb Saddam's nuke reactor. Melalui: <https://www.timesofisrael.com/35-years-on-iaf-pilots-recall-daring-mission-to-bomb-saddams-nuke-reactor/> [Pada 3 maret 2019].
- Staff, Toi. 2017. Iraq bans Israeli flags after Kurds wave them at independence rallies. Melalui: <https://www.timesofisrael.com/iraq-bans-israeli-flags-after-kurds-wave-them-at-independence-rallies/> [Pada 11 maret 2019].
- Staff, Toi. 2017. Netanyahu said to be lobbying world leaders to support Kurds. Melalui: <https://www.timesofisrael.com/netanyahu-said-to-be-lobbying-world-leaders-to-support-kurds/> [Pada 1 januari 2019].